

kh
Dag. 05/05
Han
P

SKRIPSI
PERLINDUNGAN PATEN BAGI INVENTOR
PENERIMA BEA SISWA



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

WATI HANDAYANI

039714574

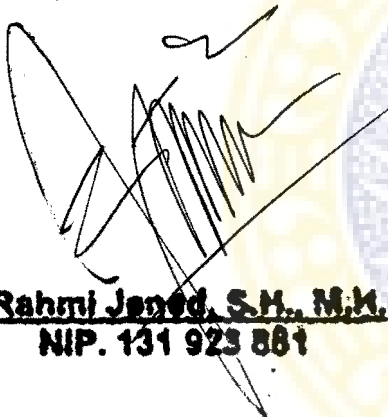
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004

PERLINDUNGAN PATEN BAGI INVENTOR PENERIMA BEA SISWA

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing,



Rahmi Jened, S.H., M.H.
NIP. 131 923 881

Penyusun,



WATI HANDAYANI
NIM. 039714574

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

Skripsi ini Telah Oljji Dan Diperkahkan Di Hadapan Panitia Penguji

Pada Tanggal : 20 Juli 2004

Panelita Penguji Skripsi

Ketua : H. A. Omar Wongsodiwirdjo, S. H.

Anggota : 1. Rahmi Jened, S.H., M.H

2. Hj. Mue Rahmah, S.H., M.H

3. Dra. Hj. Soendari Kabat S.H., M. Hum.

4. Hj. Jani Purnawanty, S.H., S.S., LL.M.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hubungan hukum antara inventor penerima bea siswa dengan penyandang dana atau pemberi fasilitas, menentukan perolehan Paten. Dalam hal inventor melakukan invensi dengan memanfaatkan fasilitas dan atau sarana yang diberikan oleh pihak lain, maka yang menjadi pemegang Paten adalah mereka yang memberikan fasilitas dan atau sarana tersebut. Namun dalam hal ini perlu dilihat perjanjian diantara para pihak tersebut serta perlu dilihat seberapa besar sumbangsih/arti dari fasilitas dan atau sarana yang diberikan tersebut dalam terwujudnya invensi. Walaupun inventor bukan sebagai pemegang hak namun ia masih memiliki hak atas invensinya tersebut sebagai kompensasi atas segala jerih payah, tenaga dan pikiran dari inventor dalam membuat invensi tersebut, yaitu berupa hak ekonomi untuk menerima imbalan, hadiah, prosentase, bonus atau lainnya sesuai dengan kesepakatan para pihak. Selain itu ada hak moral yaitu hak untuk tetap dicantumkan namanya sebagai inventor pada invensinya tersebut.

b. Dalam hal terjadi pelanggaran Paten maka hukum menyediakan sarana pemulihan. Hal ini mengingat Paten adalah menyangkut perlindungan hukum kepada pemegang Paten atas invensinya. Bila terjadi pelanggaran Paten seseorang, maka pemegang Paten yang sah (yang telah didaftarkan dan dibuktikan dengan Sertipikat Paten) dapat menegakkan hak-haknya yang telah dilanggar dengan melakukan upaya pemulihan. Upaya pemulihan yang dilakukan dapat ditempuh melalui tuntutan pidana, gugatan perdata, gugatan pembatalan Paten, meminta penetapan sementara, atau upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, maupun cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan bagi mahasiswa yang memiliki invensi yang belum di Patenkan kemudian invensi tersebut digunakan oleh pihak lain maka upaya pemulihannya adalah mengajukan gugatan perdata karena perbuatan melanggar hukum dan atau wanprestasi, atau tuntutan pidana karena persaingan curang dan atau perbuatan tidak menyenangkan, atau melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

2. Saran

a. Dalam hal seorang inventor yang akan melakukan invensi dengan memanfaatkan fasilitas, sarana, atau dana dari pihak lain,

sebaiknya dibuat perjanjian yang secara tegas menjelaskan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan tersebut.

- b. Dalam hal seorang inventor yang melakukan invensi supaya berhati-hati dan pandai-pandai memilah informasi mana saja yang boleh dan perlu disampaikan/dipublikasikan kepada pihak lain, terutama jika invensi itu belum diajukan permohonan Patennya. Agar ide atau Paten tersebut tidak dicuri oleh orang lain atau bahkan dinyatakan hilang kebaruannya (syarat novelty)
- c. Agar setiap inventor menindak lanjuti tiap invensinya dengan mendaftarkan Patennya, agar tidak sia-sia/cuma-cuma atau bahkan dicuri oleh pihak lain. Karena Paten memiliki hak ekonomi, baik yang berguna dan bermanfaat bagi inventornya sendiri maupun bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia, terutama jika inventor adalah mahasiswa yang dikirim oleh negara (instansi pemerintah Indonesia) untuk tugas belajar ke luar negeri